

**KAJIAN AKADEMIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KOTA PAGAR ALAM**

FACHRIZAL BACHRI

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,  
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia***ABSTRACT**

*This academic exercise explained the poverty phenomenon in Pagar Alam city, South Sumatra province. It tries also to elaborate the causes of poverty and poverty alleviation programs implemented by Local Government. Opportunities to alleviate poverty and improve well-being depend on the supporting environment. The ability of poor people should be harnessed and strengthened. In addition, the Government should create an institutional framework that supports the strategy of self-improvement and sustainable welfare. Local governments, the private sector, and together with the people have a big role to create such opportunities. Local Government is also obliged to control the private sector and enforce legal obligations, environmental, and social order to reduce the negative impact of business practices on the environment, and maximize the benefits for society. Vulnerability also needs to be reduced. This can be done with the use of the function of social safety nets such as free health insurance, free education and food subsidy.*

*To improve the welfare sector in the framework of decentralization include macro and micro perspectives. From the macro side, it takes a synergistic cooperation between central governments, provincial governments including city government and private sector. Whereas from the micro side, it is to increase the monitoring and planning activities. This means to improve infrastructure and services, to maintain the subsidy system, to improve the natural environment including the economic environment, the social environment, and the political environment*

*Keywords: Poverty, Policy, Welfare*

---

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 5% – 6% per tahun disertai dengan peningkatan jumlah penduduk miskin berkisar 37 juta jiwa tahun 2007 tentunya mengundang sejumlah pertanyaan, seperti: siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh peningkatan produktivitas ataukah penggunaan faktor produksi, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu sementara beberapa sektor lainnya pertumbuhannya relatif lambat sehingga tidak mampu menekan kemiskinan.

Sementara itu studi dari Bank Dunia menyebutkan bahwa hampir 50% dari jumlah penduduk Indonesia dikategorikan "miskin" dan "berada di ambang kemiskinan". Hal ini menjadikan permasalahan kemiskinan patut mendapat perhatian yang besar dari semua pihak.

Kota Pagar Alam sebagai salah satu kota hasil pemekaran di propinsi Sumatera memiliki pertumbuhan ekonomi berkisar 4% juga belum berhasil mengatasi masalah

kemiskinan. Sejalan dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia, terjadi pula perubahan di Kota Pagar Alam. Peran sektor pertanian, yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat semakin menurun. Sementara itu sektor sekunder dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa-jasa) semakin meningkat *share*-nya. Perubahan struktur ini juga diduga turut berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap tingginya angka kemiskinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut menarik kiranya untuk dilakukan penelitian tentang Analisis Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pagar Alam. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjelaskan fenomena kemiskinan yang terjadi di Kota Pagar Alam serta strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan di Kota Pagar Alam di masa depan. Studi ini dilakukan dengan metode survey untuk mendapatkan informasi kondisi riil lapangan yang diamati yaitu di kelurahan-kelurahan dan kecamatan. Populasi survey ini adalah rumah tangga miskin di Kota Pagar Alam tahun 2008 berjumlah 8.994 rumah tangga tersebar dalam wilayah 5 kecamatan Studi ini mencakup kondisi data fisik lapangan (sarana dan prasarana), sosial budaya dan ekonomi juga tentang termasuk persepsi masyarakat terhadap kondisi saat ini dan harapannya kedepan yang dapat dijadikan tolak ukur positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Fenomena Kemiskinan di Sumatera Selatan

Indikator kemiskinan yang digunakan di Indonesia adalah garis kemiskinan. BPS menentukan batas garis kemiskinan berdasarkan besarnya rupiah yang digunakan untuk dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Indikator lain yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Distributionally Sensitive Index*-P2), Terdapat juga indikator kemiskinan lainnya yang sering digunakan dalam membahas permasalahan kemiskinan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, Tahun 2006 - 2007**

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin		Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	
		2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	Kab.Ogan Komering Ulu	46.1	40.6	17.80	15.69	165070	168892
2	Kab.Ogan Komering Ilir	174.1	152.7	25.93	22.50	180486	162533
3	Kab.Muara Enim	140.7	128.5	21.88	19.87	181651	182844
4	Kab.Lahat	163.1	94.9	29.67	28.09	168011	182003
5	Kab.Musi Rawas	166.9	160.3	34.49	32.93	183581	206649
6	Kab.Musi Banyu Asin	171.8	165.6	35.52	33.60	172180	213120
7	Kab.Banyu Asin	149.9	136.8	19.81	17.72	153640	171338
8	Kab.Ogan Komering Ulu	67.8	61.2	21.06	18.96	165070	151093
9	Kab.Ogan Komering Ulu	103.1	90.7	18.26	16.03	165070	162262
10	Kab.Ogan Ilir	82.7	79.6	22.67	21.57	180486	197403
11	Kab.Empat Lawang		49.7		23.50		175268
71	Kota Palembang	126.3	124.4	9.23	8.98	210381	188046
72	Kota Prabumulih	12.3	10.0	9.33	7.57	167307	176460
73	Kota Pagar Alam	13.7	11.2	11.88	9.75	142196	137667
74	Kota Lubuklinggau	28.5	25.6	16.01	14.25	168993	183984
	<b>SUMATERA SELATAN</b>	1446.9	1331.8	20.99	19.15	185253	178209

Sumber : BPS, 2007

**Tabel 2. Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan  
Tahun 2006 – 2007**

Kode	Kabupaten/Kota	P1		P2	
		2006	2007	2006	2007
1	Kab.Ogan Komering Ulu	2.74	1.83	0.64	0.32
2	Kab.Ogan Komering Ilir	5.23	3.80	1.60	0.94
3	Kab.Muara Enim	2.61	2.57	0.51	0.45
4	Kab.Lahat	4.64	4.19	1.16	0.99
5	Kab.Musi Rawas	6.33	5.75	1.67	1.48
6	Kab.Musi Banyu Asin	6.64	5.61	1.88	1.40
7	Kab.Banyu Asin	3.28	2.55	0.79	0.61
8	Kab.Ogan Komering Ulu	3.65	2.27	0.94	0.45
9	Kab.Ogan Komering Ulu	2.96	2.02	0.76	0.43
10	Kab.Ogan Ilir	4.44	2.42	1.34	0.44
11	Kab. Empat Lawang		3.89		0.99
71	Kota Palembang	1.47	1.46	0.40	0.37
72	Kota Prabumulih	1.31	0.92	0.28	0.20
73	Kota Pagar Alam	2.10	1.46	0.55	0.34
74	Kota Lubuklinggau	3.01	2.21	0.91	0.47
<b>SUMATERA SELATAN</b>		<b>3.44</b>	<b>3.84</b>	<b>0.92</b>	<b>1.14</b>

Sumber : BPS, 2007

Pada tahun 2007 Kota Pagar Alam merupakan salah satu daerah di Sumatera Selatan yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan 0,34. Angka ini merupakan urutan ketiga terkecil setelah Kota Prabumulih (0,20) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (0,32). Hal ini berarti bahwa daerah-daerah ini memiliki rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan terkecil.

**Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2004 dan 2007**

No.	Daerah	2004	2007
1.	Sumatera Selatan	69,6	71,4
2.	Ogan Komering Ulu	69,3	71,40
3.	Ogan Komering Ilir	68,1	69,15
4.	Muara Enim	68,1	69,42
5.	Lahat	67,2	69,35
6.	Musi Rawas	64,4	66,31
7.	Musi Banyuasin	68,1	66,31
8.	Banyuasin	66,7	66,60
9.	Ogan Komering Ulu Selatan	67,9	70,28
10.	Ogan Komering Ulu Timur	65,1	68,14
11.	Ogan Ilir	65,6	68,17
12.	Kota Palembang	73,1	74,94
13.	Kota Prabumulih	70,7	72,51
14.	Kota Pagar Alam	69,5	71,70
15.	Kota Lubuk Linggau	65,8	69,24

Sumber : BPS, 2007

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara regional (Sumatera Selatan) pada tahun 2007 peringkat tertinggi adalah Kota Palembang dengan nilai IPM tercatat sekitar 73,1, selanjutnya Kota Prabumulih yang memiliki nilai IPM 72,51, sedangkan Kota Pagar Alam menduduki peringkat ketiga tertinggi dengan nilai IPM sebesar 71,70.

## Akar Permasalahan Kemiskinan

### 1. Kegagalan Pemenuhan Hak Dasar

- Dilihat dari dari aspek penghasilan, lantai rumah, saluran limbah, dinding bangunan, tempat buang air besar, penerangan, sumber air minum, bahan bakar untuk masak,

mengonsumsi daging/susu/ayam per minggu, membeli pakaian baru per tahun, frekuensi makan setiap hari, dari hasil survey diketahui sebagian besar responden yang diwawancarai memiliki penghasilan  $\leq$ Rp.300.000,- per bulan 66,92 persen, 66,99 persen menyatakan tidak sanggup membeli sama sekali daging/ayam/susu untuk konsumsi keluarga, 73,2 persen kadang-kadang membeli pakaian baru setiap tahunnya, dan frekuensi keluarga makan setiap hari 13,83 persen responden menyatakan makan 2 kali dalam sehari

- b. Tempat tinggal yang sehat dan layak merupakan kebutuhan yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Kondisi rumah responden dari segi lantai rumah dari hasil survey didapatkan 69,65 persen lantai rumah hanya dari kayu murahan, 71,89 persen dinding bangunan rumah hanya kayu, 10,45 persen penerangan rumah telah menggunakan minyak tanah, dan bahan bakar untuk masak yang digunakan responden dari hasil survey didapatkan 54,75 persen menggunakan kayu bakar.
- c. Dari hasil survey diketahui bahwa sekitar 68,18 persen sumber air rumah tangga miskin berasal dari sumur tidak terlindung, dan sekitar 66,67 persen tempat buang air besar rumah tangga miskin adalah ke sungai.
- d. Dari hasil survey diketahui pula bahwa terdapat beberapa kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang menurut responden mengalami penurunan yaitu kualitas dan luas hutan, kualitas air sungai, konflik mengenai sumber daya alam, dan solidaritas untuk bergotong royong.
- e. Selain itu dari hasil survey diketahui pula bahwa terdapat beberapa kondisi kecenderungan umum di daerah kantong-kantong kemiskinan di Kota Pagar Alam yang menurut responden mengalami peningkatan yaitu individualisme, ketersediaan jenis-jenis pangan, kekayaan materi, ketidaksetaraan, nilai penting pendidikan formal, ketersediaan barang, mekanisme penyelesaian konflik tradisional. Selain itu terdapat juga yang cenderung mengalami peningkatan yaitu partisipasi politik dan hak menentukan nasib sendiri, kecenderungan ke arah kepemilikan individu atas sumber daya alam, hubungan dengan Pemda, infrastruktur transportasi, fasilitas komunikasi, layanan kesehatan.
- f. Dari hasil survey diketahui bahwa sekitar 65,79 persen responden percaya potensi permasalahan sosial yang timbul akibat adanya kemiskinan adalah masalah kriminalitas, sekitar 63,64 persen potensi permasalahan ekonomi yang timbul adalah rendahnya keterampilan, sekitar 52,64 persen potensi permasalahan lingkungan adalah masalah MCK dan sarana olah raga, sekitar 52,18 persen responden percaya kendala dalam masyarakat rumah tangga miskin yang dihadapi adalah ***ketrampilan kerajinan tradisional belum dikembangkan*** dan Modal dan Pasar produk makanan/kerajinan daerah masih terbatas, dan pendapat terbanyak atau sekitar 24,58 persen responden percaya faktor penyebab kemiskinan adalah Individu (Etos kerja rendah, tidak memiliki ketrampilan khusus, pekerjaan tidak tetap, pendapatan relative rendah, tidak memiliki modal).

## **2. Lemahnya Penanganan Masalah Kependudukan**

Beban masyarakat miskin semakin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup. Berdasarkan jumlah anggota keluarga yang dimiliki sebagian besar responden sekitar 179 (52,65 %) memiliki jumlah anggota keluarga berjumlah 3 – 4 orang. Kemudian sekitar 65 responden (19,12 %) memiliki anggota keluarga sebanyak 5 – 6 orang dan sekitar 29 (8,53 %) memiliki anggota keluarga lebih dari 6 orang. Sisanya sekitar 49 responden (14,41 %) memiliki anggota keluarga berjumlah 2 orang dan sekitar 18 responden (5,29 %) memiliki anggota keluarga berjumlah 1 orang.

### **3. Kesenjangan Antar daerah**

Gambaran kesenjangan antar daerah ditunjukkan oleh distribusi persentase penduduk miskin dan tingkat produksi. Berdasarkan distribusi penduduk miskin pada tahun 2008, dari 5 kecamatan di Kota Pagar Alam dengan penduduk miskin tertinggi terdapat di 2 (dua) kecamatan di Kota Pagar Alam, yaitu Kecamatan Pagar Alam Selatan dengan jumlah rumah tangga miskin sekitar 2900 rumah tangga dan Kecamatan Pagar Alam Utara dengan jumlah rumah tangga miskin sekitar 2.314 rumah tangga. Selanjutnya yang berada di Kecamatan Dempo utara sekitar 1.374 rumah tangga, Kecamatan Dempo Tengah sekitar 1.309 rumah tangga dan Kecamatan Dempo Selatan sekitar 1.097 rumah tangga miskin (BPS, 2009).

## **Strategi Dan Kebijakan Serta Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan**

### **1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

1. Perluasan kesempatan
2. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat
3. Peningkatan kapasitas
4. Perlindungan sosial

### **2. Kebijakan**

1. Kebijakan Ekonomi Makro
  - a. Penciptaan Stabilitas Ekonomi Makro
  - b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
  - c. Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha
  - d. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah
2. Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar
  - a. Pemenuhan Hak atas Pangan
  - b. Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan
  - c. Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan
  - d. Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Berusaha
  - e. Pemenuhan Hak atas Perumahan
  - f. Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi yang Baik
  - g. Pemenuhan Hak atas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
  - h. Pemenuhan Hak atas Rasa Aman
  - i. Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi
3. Kebijakan Pengembangan Wilayah Mendukung Pemenuhan Hak-hak Dasar

## **Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pagar Alam**

Mayoritas responden yaitu sebanyak 66,67 persen responden mengusulkan adanya Pendekatan lima kebijakan (perluasan kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, perlindungan sosial, peningkatan kapasitas lingkungan). Selain itu pendekatan urgensi berdasarkan prioritas: gawat, mendesak, prasyarat dan pelengkap sekitar 10,42 persen responden menganggap program tersebut juga menjadi agenda penanggulangan kemiskinan. Setidaknya terdapat sekitar 22,92 persen responden yang menginginkan atau mengusulkan adanya Pendekatan Tridaya yaitu menggunakan pertimbangan tiga dimensi: sosial, ekonomi dan lingkungan dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Pagar Alam.

## PENUTUP

### Rekomendasi

Setelah memaparkan fenomena kemiskinan dan akar permasalahan kemiskinan, pertanyaan yang terungkap adalah apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan di Kota Pagar Alam. Sejumlah rekomendasi umum dan beberapa saran metodologis yang sangat spesifik dan berorientasi tindakan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Pagar Alam dapat disusun berikut ini..

Peluang untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sangat tergantung pada lingkungan pendukung. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pagar Alam, kemampuan warga miskin harus dimanfaatkan dan diperkuat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempelajari strategi-strategi mata pencaharian setempat yang ada dan memastikan bahwa strategi mata pencaharian alternatif tidak hilang akibat praktek pengambilan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah kota diharapkan dapat menciptakan kerangka kelembagaan yang mendukung strategi peningkatan kesejahteraan yang swadaya dan berkelanjutan. Warga di Kota Pagar Alam memang memerlukan kesempatan ekonomi seperti pekerjaan dan pasar, tetapi di samping itu mereka juga membutuhkan kesempatan politik untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di daerahnya.

Pemerintah kota, bersama jenjang pemerintahan lain dan sektor swasta, memiliki peran besar untuk menciptakan kesempatan tersebut. Pemda juga berkewajiban mengendalikan sektor swasta dan menegakkan kewajiban hukum, lingkungan, dan sosial guna mengurangi dampak negatif praktek usaha terhadap lingkungan, dan memaksimalkan keuntungan bagi masyarakat. Kerentanan juga perlu dikurangi. Hal ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan fungsi jaring pengaman sosial seperti asuransi kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan beras bersubsidi. Selain itu kerentanan dapat dikurangi dengan tindakan sektor swasta dan lembaga tradisional seperti jaring pengaman berbasis keluarga atau masyarakat. Kerentanan ekonomi dapat dikurangi dengan diversifikasi penghasilan dan berbagai portofolio strategi mata pencaharian alternatif. Akan tetapi upaya ini sangat tergantung pada kualitas lingkungan alam. Terakhir, diperlukan pelestarian lingkungan untuk menjamin stabilitas jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan warga setempat. Mengorbankan lingkungan atau kerukunan sosial untuk tujuan ekonomi jangka pendek tidak akan meningkatkan kesejahteraan. Memahami dan menyeimbangkan untung-rugi antara berbagai aspek kesejahteraan merupakan syarat penting dan hal ini merupakan tantangan yang besar bagi pengambil keputusan di Kota Pagar Alam.

Rekomendasi utama untuk pemerintah daerah Kota Pagar Alam untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kerangka desentralisasi meliputi :

#### 1. Secara Makro

- a. Dalam mengimplementasikan strategi yang diusulkan, diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta kemitraan sektor publik dan sektor swasta. Untuk itu, pemerintah daerah perlu lebih transparan dan menyediakan informasi yang mudah dijangkau dan terpercaya mengenai iklim bisnis dan peluang-peluang bisnis (peluang investasi) di daerah.
- b. Peraturan daerah yang diperlukan daerah adalah yang mampu meningkatkan kinerja ekonomi, social dan politik daerah itu sendiri. Tetapi perlu diingat, bahwa munculnya perda yang ada jangan sampai mematikan kegiatan ekonomi itu sendiri (*diseconomic*) atau bahkan menimbulkan restriksi (*trade barriers*) perdagangan antar daerah sendiri yang

akhirnya menurunkan kesejahteraan daerah itu sendiri. Untuk itu, daerah perlu mengembangkan kerjasama horisontal dan vertikal (*horizontal and vertical integration*) dengan daerah maupun pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi.

- c. Beberapa fasilitasi atau pelayanan yang penting dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di Kota Pagar Alam :
- Mendukung promosi dan/atau integrasi produksi dari Kota Pagar Alam ke pasar, baik pasar lokal-regional maupun pasar luar negeri, dengan cara: Mendukung pembangunan infrastruktur seperti
- Percepatan pembukaan/pembangunan akses jalan baru dari Pagar Alam – Lahat.
  - Pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) bagi masyarakat agar menyiapkan pendidikan praktis yang mudah dipahami masyarakat dan menghasilkan masyarakat siap pakai dalam bekerja.
  - Memfasilitasi pengusaha UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk, pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha dan lain-lain.

## **2. Secara Mikro**

### ***a. Meningkatkan pemantauan dan perencanaan***

- Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemiskinan di Kota Pagar Alam (siapa yang miskin, seberapa miskin mereka, di mana mereka tinggal dan mengapa mereka miskin, apa yang dapat dilakukan, dan bagaimana fakta-fakta ini berubah dari waktu ke waktu)
- Memfasilitasi perencanaan pembangunan masyarakat
- Mengembangkan proses perencanaan yang lebih partisipatif

### ***b. Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan***

- Meningkatkan pelayanan penyuluhan (hutan kemasyarakatan, pertanian, manufaktur)
- Memberi lebih banyak kegiatan pengembangan kapasitas (misalnya, kursus pelatihan) bagi masyarakat
- Meningkatkan jumlah dan kualitas guru dan membuka sekolah kejuruan (SMK)
- Meningkatkan jumlah dan kualitas petugas dan fasilitas kesehatan
- Memberi insentif yang lebih banyak bagi tenaga kesehatan dan pendidikan yang bekerja di kawasan terpencil
- Memantau kehadiran dan kualitas tenaga pendidikan dan kesehatan
- Meningkatkan akses kepada masyarakat terpencil,
- Meningkatkan infrastruktur ekonomi (jalan dan jembatan, pasokan energi, komunikasi)
- Meningkatkan jumlah pendidikan kejuruan.

### ***c. Mempertahankan sistem subsidi***

- Melanjutkan program asuransi kesehatan untuk warga miskin
- Melanjutkan program beras bersubsidi
- Meneruskan program sekolah gratis, sampai SLTA

### ***d. Meningkatkan kelestarian lingkungan alam***

- Membuat dan menegakkan kerangka hukum untuk pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, termasuk sumber daya alam dan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat
- Mendukung upaya-upaya konservasi
- Mengupayakan intensifikasi bagi upaya reboisasi

- Menengahi pertentangan antara aturan adat dan sumber daya hukum
- Menegakkan kewajiban hukum perusahaan (yang berkenaan dengan masyarakat dan lingkungan/pencemaran).

***e. Meningkatkan lingkungan ekonomi***

- Menciptakan lingkungan pendukung yang stabil untuk pembangunan ekonomi
- Menarik investor
- Mendukung wirausaha lokal, misalnya melalui keringanan pajak selama tahap awal
- Menentukan upah minimum bagi karyawan perusahaan untuk mengatasi jerat utang
- Membentuk dan menegakkan peraturan keselamatan kerja dan persyaratan kesehatan dasar bagi karyawan
- Mendukung usaha kecil menengah (misalnya, melalui layanan bantuan perintisan termasuk pengurangan pajak)
- Memperkuat kecakapan masyarakat setempat dalam pengelolaan keuangan
- Mendata dan mendukung strategi mata pencaharian lokal yang berkelanjutan, misalnya, sistem mata pencaharian berdasarkan budi daya padi di dataran tinggi dan perolehan pendapatan dari sektor bukan pertanian
- Memfasilitasi akses ke modal dan pasar, juga melalui perluasan lembaga-lembaga kredit.

***f. Meningkatkan lingkungan sosial***

- Mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan kelompok sosial yang sesuai
- Menawarkan mediasi konflik dan sengketa antar kampung atau antara kampung dan perusahaan
- Mendorong kerukunan sosial
- Mendorong kolaborasi antara kelompok kepentingan setempat
- Menyebarkan jumlah dan kualitas pembangunan secara lebih merata.

***g. Meningkatkan lingkungan politik***

- Memberdayakan kampung dan kelompok yang rentan atau marginal melalui partisipasi yang lebih besar
- Membangun komunikasi dua arah yang tulus dengan warga miskin
- Meningkatkan tanggung jawab pemimpin kecamatan dan kampung terhadap konstituennya
- Memberikan dan menegakkan perlindungan hukum dan keamanan
- Memperkuat hak lahan tradisional dan hak pemanfaatan sumber daya
- Meningkatkan transparansi dan melawan korupsi

**DAFTAR RUJUKAN**

- Arikunto, Suharsimi, 1986, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara Jakarta  
 Ala, Andre Bayo, 1996, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta  
 Arief, Sritua, 1996, *Teori Ekonomi Mikro dan makro Lanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta  
 BPS, 2006, *Kota Pagar Alam Dalam Angka*, Pagar Alam  
 BPS, 2007, *Data dan Informasi Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta  
 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2000, *Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Keluarga Miskin Melalui Pendataan Keluarga*, Biro Pelaporan dan Statistik BKKBN

- Deaton, Angus, and Muellbauer, John, 1998, *Economics and Consumer Behavior*, Cambridge University Press,
- Hasibuan, Nurimansyah (Ed), 1995, *Metode Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, Universitas Sriwijaya, Palembang
- Hadi, Sutrisno, 1976, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit, Yogyakarta
- Kusnaedi, 1995, *Membangun desa: Pedoman Untuk Penggerak Program IDT*, Mahasiswa KKN, dan Kader Pembangunan Desa
- Mubyarto, 1991, *Menanggulangi Kemiskinan*, Aditya Media, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1994, *Profil Desa Tertinggal Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1996, *Strategi Pembangunan Masyarakat desa di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta
- Mochtar, 1997, *Pengantar Statistik, Jilid II*, Institut Ilmu Pemerintahan Press, Jakarta